



KAPUAS HULU!
HEBAT!

RENCANA KERJA 2024

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

**PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu lebih terarah dan terukur.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja ini demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam peningkatan akses Komunikasi dan Informatika bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Oktober 2023

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu



HADI PRANATA, S.TP., M.Si

Pemangkat. I (IV/b)

NIP. 19810207 200003 1 001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan OPD	37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	55
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	62
3.3 Program dan Kegiatan.....	63
BAB RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
IV	
BAB V PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD T.A Tahun 2024 Kabupaten Kapuas Hulu
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran DKIS Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2021-2026)
Tabel 4.1	Rekap Usulan Renca Kerja Tahun 2024
Lampiran	Matriks RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026, menetapkan Visi yang merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan adalah:

“Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”

Sedangkan misinya adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi.
3. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab melaksanakan misi Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 adalah *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas”*. Yang tujuannya adalah Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sasarannya adalah Optimalnya Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu dan Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik.

Strategi untuk mewujudkan yaitu meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kapuas Hulu tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu perangkat daerah yang



mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi dan informatika.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 7 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam usianya yang masih muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berupaya berbenah diri untuk meningkatkan kinerja baik dalam melaksanakan program / kegiatan maupun bidang administrasi dan keuangan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar 5587);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;



14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005– 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Kabupaten Kapuas Hulu, dengan



harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan :

1. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2024;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik.**

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.



Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan meliputi pokok pokok materi sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil kinerja program/ kegiatan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Tahun 2023 belum dapat memenuhi target yang direncanakan karena belum habisnya tahun anggaran 2023. Berikut ini disajikan Tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas tahun 2023 sementara:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2022	Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	16	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									



2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA										
2	16	01	2	01		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra Diskominfo 2021-2024 ; 2. IKU Diskominfo 2021-2024 ; 3. Renja Diskominfo 2023; 4. KAK Renja Diskominfo 2022; 5. Renja Perubahan Diskominfo 2022.	5	5	5	5	100%	7			
2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah RKA Diskominfo202 2;	1	1	1	1	100%	1			



2	16	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA Diskominfo2022;	1	1	1	1	100%	1		
2	16	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Diskominfo 2022	1	1	1	1	100%	1		
2	16	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA Diskominfo 2022	1	1	1	1	100%	1		
2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100%	1		
2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev Kinerja Diskominfo Tahun 2022 per-triwulan; 2. Pengukuran Kinerja Diskominfo 2022 per-triwulan.	8	8	8	8	100%	12		
2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									



2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	15	16	17	106%	17		
2	16	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	9	12	12	100%	-		
2	16	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	4	4	100%	4		
2	16	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100%	1		



2	16	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	-	-	-	0%	1		
2	16	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semeste ran SKPD	2	2	2	2	100%	16		
2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2	16	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	-	-	0%	-		



2	16	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di Amankan	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun 2022	1	1	1	1	100%	1		
2	16	01	2	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									



2	16	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	26	-	34	26	76%	52		
2	16	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33	-	1	1	100%	123		
2	16	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah DUK ; 2. Kenaikan Pangkat 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Absen	4	4	4	4	100%	4		
2	16	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Anggaran Kinerja Pegawai	Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai 2. Penetapan Standar Teknik Kegiatan SKP 3. reformasi Birokrasi Dinas Kominfo	3	3	3	3	100%	14		



2	16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sertifikat Diklat	7	7	5	2	40%	-		
2	16	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33	1	-	-	0%	-		
2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	1	100%	8		



2	16	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	1	1	100%	2		
2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	5	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.181	1	1.181	389	33%	58.495		
								76.972		76.972	25.503	33%	-		
2	16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase Penyediaan Bahan/Material	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200	1.180	1.280	674	53%	13.525		



2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	61	84	58	69%	80		
2	16	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Agenda Surat Masuk dan Keluar	4	4	4	4	100%	4		
2	16	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	16	01	2	07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	-	-	-	0%	-		



2	16	01	2	07		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	07		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	5	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	07		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	07		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	-	-	0%	-		



2	16	01	2	07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	16	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	1.191	12	12	100%	792		
2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; 2.Rekening PDAM; 3.Rekening PLN; 4.Rekening Indihome; 5.Rekening TV Kabel; 6.Laporan Pengelolaan Website	12	12	12	12	100%	12		
2	16	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12	-	12	-	0%	-		



							Kantor									
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Pengambilan dan pengangkutan sampah)	12	4	12	12	100%	17			
							Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Pembersih ruang dan halaman kantor)		12							
2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2	16	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	1	-	-	-	0%	-			

							Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK ; 2.PKB ; 3. Biaya perbaikan	2	2	2	2	100%	2		
2	16	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	-	-	-	0%	-		



2	16	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	5	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	80	-	80	56	70%	80		
							Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang AC		16						
							Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang Komputer personal/ Laptop		30						
							Jumlah Pemeliharaan dan Penggantian Suku cadang Printer		30						
2	16	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	0%	-		



2	16	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	0%	-		
2	16	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	-	-	0%	-		
2	16	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	1	1	100%	-		
2	16	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	-	-	0%	1		
2	16	01	2	09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1	-	-	-	0%	-		



2	16	02				PROGRAM KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK										
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2	16	02	2	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	8	-	-	-	0%	-			
2	16	02	2	01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase disposisi laporan ke OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	16	02	2	01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Informasi	4	-	-	-	0%	-			
2	16	02	2	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang diproduksi	1.500	3.496	750	4.623	616%	1.600			



2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sebaran konten	7.000	6.912	3.500	7.572	216%	7.100		
2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik yang terupload	200	420	200	1.407	704%	230		
2	16	02	2	01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media dengan Pemda	7	-	-	-	0%	-		
2	16	02	2	01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kemitraan yang terbentuk dengan pemda	10	-	-	-	0%	-		
2	16	02	2	01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Laporan Manajemen Krisis	4	-	-	-	0%	-		
2	16	02	2	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah penyelenggara an kegiatan pelatihan/bimt e/sosialisasi	3	-	-	-	0%	-		
2	16	02	2	01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah fasilitasi sengketa informasi	5	-	-	-	0%	-		



2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan kemitraan	3	-	-	-	0%	-		
2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA									
2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	03	2	01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa	15	11	5	3	60%	11		
2	16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan serta Monitoring Domain dan Sub Domain Website di Lingkungan Pemerintah	77	72	56	56	100%	56		



							Daerah Kabupaten Kapuas Hulu										
2	16	03	2	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terkelolanya Jaringan Antar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	13	-	-	-	0%	-				
2	16	03	2	02		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
2	16	03	2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	26	26	10	10	100%	11				
2	16	03	2	02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Kebijakan Internal Layanan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	1	-	-	-	0%	-				



2	16	03	2	02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pusat Data Center Kabupaten Kapuas Hulu	1	-	-	-	0%	-		
2	16	03	2	02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Akses Internet	14	1	-	-	0%	-		
2	16	03	2	02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Kebijakan Internal Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	2	-	-	-	0%	-		
2	16	03	2	02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Kebijakan Internal Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2	-	-	-	0%	-		
2	16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi Pendukung SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	5	2	1	2	200%	1		
2	16	03	2	02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Integrasi Layanan SPBE Kabupaten	2	-	-	-	0%	-		



							Kapuas Hulu												
2	16	03	2	02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah implementasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Ekosistem Smart City Kabupaten Kapuas Hulu	2	-	-	-	0%	-						
							Jumlah Fasilitas Command Center Kapuas Hulu	1	-	-	-	0%	-						
2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah monitoring dan fasilitasi usulan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS dan Akses Internet)	23	83	1	4	400%	7						
2	16	03	2	02	11	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang TIK	2	-	-	-	0%	-						

2	16	03	2	02	12	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggar aan SPBE Kab. Kapuas Hulu	1	-	-	-	0%	-		
2	20	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL									
2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapas Hulu	1	1	1	1	100%	1		
2	20	02	2	01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM berkualitas untuk peningkatan mutu statistik daerah	1	-	-	-	0%	-		



2	20	02	2	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	1	1	1	1	100%	1		
2	20	02	2	01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Forum Statistik Sektoral	1	-	-	-	0%	-		
2	20	02	2	01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sarana dan Prasarana pengembangan statistik sektoral	1	-	-	-	0%	-		
2	20	02	2	01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral	1	-	-	-	0%	-		
2	21	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah									



						Daerah Kabupaten/Kota									
2	21	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	-	-	-	-	0%	1		
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Kelembagaan Urusan Persandian	1	1	2	1	50%	1		
2	21	02	2	01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	Jumlah SDM dengan Kompetensi Bidang Kemanan Infomasi Berbasis TIK	1	-	-	-	0%	-		



						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Komunikasi Persandian Daerah yang Partisipatif	1	-	-	-	0%	-		
2	21	02	2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	1	-	-	-	0%	-		
							Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Secara Komprehensif	1	-	-	-	0%	-		
2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Layanan Keamanan Informasi yang Berorientasi Pada Kebutuhan Pengguna	1	-	-	-	0%	-		
							Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi yang Andal	1	-	-	-	0%	-		



							Terlaksananya Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	1	-	-	-	0%	-		
2	21	02	2	02			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	21	02	2	02	01		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Pemenuhan Jasa Pendukung Telekomunikasi Daerah	23	23	23	23	100%	23		
							Jumlah Penguatan Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Audit Kemanan Infromasi	49	-	-	-	0%	49		



2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1	Predikat SAKIP			BB	BB	BB	BB	A	A	BB	B	-	-	-	-	
2	Indeks SPBE			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	-	-	
3	Indeks Pembangunan Statistik					Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	-	-	Cukup	-	-	-	
4	Indeks KIP			-	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	-	Informatif	Informatif	-	-	-	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan OPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa permasalahan yang harus di carikan satu solusi penyelesaiannya, kedepan permasalahan tersebut terselesaikan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, permasalahan yang mendasar di Aparatur

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota,
 - 1.1. Sub kegiatan pendaftaran nama domain pemerintah daerah yang terdapa beberapa kendala diantaranya:
 - a. Dalam pembayaran regristrasi ulang dengan pengelola domain pusat (PANDI) untuk penerbitan invoice tagihan terkendala pada aplikasi layan domain (sedang maintenance).
 - b. Dalam pemberian bukti terima pembayaran dari pengelola pusat (PANDI) sering terlambat.
 - 1.2. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - a. Permohonan subdomain oleh perangkat daerah tidak dimanfaatkan dengan baik.
 - b. Perangkat daerah yang mengelola website/aplikasu Ketika tidak dipergunakan lagi tidak melaporkan ke dinas komunikasi, informatika dan statistik seharusnya membuat permohonan non aktif subdomain atau penghapusan sub domain.
2. Kegiatan pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/kota.
 - 2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - a. Kegiatan-kegiatan dalam penilaian SPBE masih ada yang belum diakomodir dalam kegiatan.



- b. Belum bisa melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai indeks SPBE yang disebabkan keterbatasan agaran seperti pembuatan Arsitketur SPBE, Peta Rencana serta Audit SPBE.
 - c. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan kebijakan.
 - d. Tata kelola tidak terpadu.
 - e. Penerapan pelayanan berbasis elektronik belum optimal.
 - f. Jumlah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE masih terbatas.
 - g. Masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah.
 - h. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh instansi.
 - i. Pengelolaan keamanan informasi masih lemah di sistem seluruh instansi pemerintah.
- 2.2. Sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis sub kegiatan pemerintah berbasis elektronik
- a. Belum adanya regulasi terkait pembangunan aplikasi diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
 - b. Pembangunan dan pengembangan aplikasi masih belum satu pintu dikelola oleh dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. OPD membuat dan mengembangkan aplikasi masing-masing dan tanpa melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2.3. Sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan daerah.
- a. Data usulan yang disampaikan yang menjadi syarat usulan sering tidak lengkap;
 - b. Pemohonan terlalu lama dalam melengkapi kekurangan persyaratan usulan yang diminta;
 - c. Kesulitan dalam menghubungi pihak pemohon
 - d. Tidak dapat melakukan survey ke semua lokasi dikarenakan keterbatasan anggaran;
 - e. Pembangunan infrastruktur akses internet dan jaringan telekomunikasi (Tower BTS) merupakan program kementerian komunikasi dan informatika republic Indonesia.

3. Kegiatan penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup daerah kabupaten/kota
 - 3.1. Sub kegiatan koordinasi sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan desiminasi data statistic sectoral;
 - a. Terbatasnya SDM yang membidangi statistic;
 - b. Belum diterapkan sepenuhnya prinsip-prinsip satu data sehingga data yang tersedia belum memenuhi standar statistic nasional yang mengakibatkan masih diragukan kevalidannya;
 - c. Masih kurangnya pemahaman mengenai penerapan statistic sectoral di forum data kabupaten Kapuas hulu untuk mendukung terwujudnya satu data kabupaten sesuai prinsip-prinsip satu data Indonesia;
 - d. Banyaknya data yang tidak saling bersesuaian antara satu opd dengan OPD yang lain;
 - e. Tidak tersedianya anggaran yang memadai sehingga penyusunan data statistic sectoral belum maksimal.
 - 3.2. Sub kegiatan membangun metadata statistic sectoral
 - a. Terbatasnya SDM YANG MEMBIDANGI statistic.
 - b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya metadata sebagai bagian yang harus dilengkapi dalam penyusunan data
 - c. Kurangnya pemahaman mengenai tata cara penyusunan metadata sesuai standar di setiap OPD.
 - d. Minimnya mengikuti pelatihan penyusunan metadata
 - e. Tidak sedianya anggaran yang memadai sehingga penyusunan data statistic sectoral belum maksimal.
4. Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 4.1. Sub kegiatan penetapan kebijakan tata Kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - a. Kegiatan persandian digabungkan dalam urusan Seksi Statistik;
 - b. Belum tersedianya sumber daya manusia di bidang persandian (sandiman);
 - c. Terbatasnya anggaran sehingga belum bisa melaksanakan Sosialisasi mengenai keamanan informasi dengan narasumber tim BSR dari BSSN.
 - d. Kurangnya anggaran untuk kegiatan persandian.



5. Kegiatan penetapan pola hubung komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota
 - 5.1. Sub kegiatan oprasonal jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - a. Kegiatan persandian digabungkan dalam urusan seksimstatistic
 - b. Belum tersediannya sumber daya manusia di bidang persandian (sandiman)
 - c. Telah disetujui menggunakan aplikasi selection milik BSSN namun belum disetujuinya menggunakan email sanapati milik BSSN sebagai media komunikasi sandi di kabupaten Kapuas hulu.
6. **Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik**
 - a. Minimnya sarana prasarana sebagai pendukung pengelolaan media komunikasi publik, sehingga tidak semua kegiatan pemerintah bisa diliput dan dipublikasikan melalui media yang dikelola;
 - b. Kurangnya SDM dalam menghimpun, mengolah dan memproduksi konten informasi media publik;
 - c. Jangkauan siaran Rasika masih terbatas karena belum menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga belum banyak masyarakat yang terlibat dalam interaktif Rasika. Selain itu OPD juga kurang terlibat aktif dalam memberikan informasi melalui media Radio;
 - d. Masih minimnya anggaran sehingga menyebabkan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola TV dan radio belum bisa terlaksana;
 - e. Buletin online sampai dengan saat ini belum menggunakan hosting sendiri, sehingga memiliki keterbatasan dalam merilis jumlah berita dalam setiap edisi. Ketidaktersediaan self hosting untuk buletin online juga disebabkan minimnya anggaran di Tahun 2022;
7. **Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik**
 - a. Masih minimnya anggaran dalam pengelolaan konten media komunikasi publik sehingga tidak semua kegiatan Pimpinan Daerah bisa diliput atau dipublikasikan terutama kegiatan yang berlokasi di luar kota putussibau. Hal ini berakibat pada minimnya konten media komunikasi publik untuk dipublikasikan pada media yang di Kelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

- b. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam membuat strategi komunikasi serta menghimpun, mengolah dan memproduksi konten informasi media publik.

8. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik

- a. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi LAPOR;
- b. Minimnya anggaran pada kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi public menyebabkan sosialisasi keberadaan aplikasi LAPOR hanya bisa dilakukan melalui pembagian XBanner kepada OPD di Kabupaten dan ke-23 kecamatan serta melalui media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Masih kurangnya pelatihan untuk admin/operator aplikasi LAPOR terutama untuk admin kabupaten.

9. Pelayanan Informasi Publik

- a. Minimnya anggaran pada kegiatan pelayanan informasi publik;
- b. Masih minimnya permintaan informasi dari Masyarakat karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi publik dan belum mengetahui Dimana bisa memperoleh informasi publik secara *online* maupun *offline*, hal ini bisa dilihat dari minimnya masyarakat yang melakukan permintaan informasi publik melalui aplikasi secara langsung;
- c. Kendala teknis pada aplikasi PPID yaitu tidak adanya notifikasi permohonan SELESAI pada saat proses permohonan dikabulkan, padahal peminta informasi sudah menerima informasi yang diminta. Hal ini juga sudah dikoordinasikan ke pemilik aplikasi PPID (Kemendagri), namun sampai dengan saat ini belum ada solusi untuk permasalahan tersebut;
- d. Masih kurangnya inisiatif OPD untuk mengupdate Dokumen Informasi Publik (DIP) pada aplikasi PPID (Proses updating menunggu arahan dari PPID);
- e. Kurangnya pemahaman OPD terhadap peran dari PPID pelaksanaan dalam melakukan pelayanan informasi publik;
- f. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa tentang Sistem Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD T.A. 2024 disajikan pada tabel berikut

kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2024		Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
								target	Pagu Indikator			
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra Diskominfo 2021-2024 ; 2. IKU Diskominfo 2021- 2024 ; 3. Renja Diskominfo 2022; 4. KAK Renja Diskominfo 2021; 5. Renja Perubahan Diskominfo 2021 .	1 Dokumen	10.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA Diskominfo2022;	1 Dokumen	6.465.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA Diskominfo2022;	1 Dokumen	6.262.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Diskominfo 2021	1 Dokumen	7.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA Diskominfo 2021	1 Dokumen	7.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Monev Kinerja Diskominfo Tahun 2021 per-triwulan; 2. Pengukuran Kinerja Diskominfo 2021 per-triwulan.	12 Laporan	16.080.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.166.381.279,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Kominfo	20 Orang/bulan	1.930.925.992,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Verifikasi	4 Dokumen	187.016.500,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024	1 Laporan	6.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaa	2 Dokumen	5.300.787,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan RFK - 0 (Jan-Des 2021) ; 2.Laporan Keuangan Semesteran (Jan s/d Juni 2021); 3. Laporan Fungsional Keuangan	16 Laporan	37.138.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		142.260.276,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	1 Dokumen	1.245.420,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	16	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	1 Dokumen	3.319.400,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.962.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.926.184,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.716.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun 2021	1 Laporan	10.998.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		23.828.160,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Spanduk dan Banner pembinaan disiplin pegawai	52 Unit	8.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	16	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah DUK ; 2. Kenaikan Pangkat 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Absen	4 Dokumen	5.945.160,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	1 Dokumen	-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai 2. Penetapan Standar Teknik Kegiatan SKP 3.reformasi Birokrasi Dinas Kominfo	14 Dokumen	9.883.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sertifikat Diklat	11 Orang	-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		552.045.975,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	115.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	16	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	10.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	45.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Agenda Surat Masuk dan Keluar	4 Dokumen	12.045.975,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			653.160.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon; 2.Rekening PDAM; 3.Rekening PLN; 4.Rekening Indihome; 5.Rekening TV Kabel; 6.Laporan Pengelolaan Website	12 Laporan	120.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	533.160.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		225.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK ; 2.PKB ; 3. Biaya perbaikan	2 Unit	100.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	45.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	80.000.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	16	02	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Predikat Keterbukaan Informasi Publik		394.897.880,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota		394.897.880,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	02	2	01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase disposisi laporan ke OPD	12 Dokumen	35.769.840,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	02	2	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang diproduksi	2000 Dokumen	104.324.670,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah sebaran konten	7100 Dokumen	117.683.580,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi Publik yang terupload	230 Dokumen	137.119.790,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kemitraan kegiatan	1 Dokumen	-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Total bobot domain evaluasi SPBE		142.802.500,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase Pengelolaan Nama domain yg telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain dilingkungan pemerintah kapuas hulu		28.716.100,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	03	2	01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa	30 Domain	25.261.800,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan serta Monitoring Domain dan Sub Domain Website di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	80 Dokumen	3.454.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SPBE di Lingkungan pemerintahan Kapuas Hulu		114.086.400,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	03	2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	10 Dokumen	31.190.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	03	2	02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Kebijakan Internal Layanan SPBE Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	16	03	2	02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Kabupaten Kapuas Hulu	1 Unit	-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pendukung SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	5 Unit	54.573.900,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	28.322.200,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			20.830.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Kompilasi data statistik sektoral yang dilakukan		20.830.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase OPD yang menggunakan data statistik Sektoral dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		20.830.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	1 Dokumen	38.985.000,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	20	02	2	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral	1 Dokumen	20.830.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	20	02	2	01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Forum Statistik Sektoral	50 Orang	-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	21	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			34.795.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Predikat Kabupaten Kapuas Hulu KAMI		34.795.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PresentaseTerwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik atau e-governmen		-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2	21	02	2	01	01	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	-	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	21	02	2	02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terlaknnya Kerjasama dengan BSSN dalam penertipan tandatangan digital dan email sinapati di lingkungan pemerintah		34.795.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	
2	21	02	2	02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	34.795.300,00	DISKOMINFOTIK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum/ APBD	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil forum SKPD yang telah dilaksanakan tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas mendapat beberapa usulan program / kegiatan yang diusulkan masyarakat dari hasil musrenbang Kecamatan yang berupa pembangunan BTS/Tower mini dan Internet Desa dan oleh Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik Kab. Kapuas Hulu akan di sampaikan/diajukan ke pihak Kementerian Kominfo jika sudah memenuhi syarat yaitu pengajuan proposal dari pihak Desa/Kecamatan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Penataan Ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UU 24 / 1992), Yang Kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/ 2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang – Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kapuas Hulu Yang akan ditelaah karena memberikan dampak lingkungan, baik dampak positif maupun negatif Yaitu:

1. Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan.
3. Pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi dan telekomunikasi.
4. Ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan.
5. Pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral.
6. Penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
7. Pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
8. Penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan instrument ekonomi berbasis lingkungan, meliputi:

1. Tidak mengeluarkan izin baru untuk segala kegiatan berskala besarseperti perkebunan, perusahaan HPH – HTI, dan pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu, Khususnya di dalam dan disekitar Kawasan hutan: taman nasional dan hutan lindung.
2. Bagi izin yang telah dikeluarkan sebagaimana kegiatan tersebut, maka perlunya komitmen yang ketat dan legal sebagai sanksi bagi Perusahaan tersebut
3. Kewajiban untuk membentuk kawasan pelestarian (HCV: High Conservation Value) di setiap perusahaan tersebut, sehingga lahan yang telah diberi izin tersebut telah mencadangkan dan meng-enclave lahan perusahaan mereka sebagai lahan pelestarian biodiversitas.

4. Kebijakan ini dapat diperkuat dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum.
5. Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan perizinan yang berlaku dengan memberikan sanksi berupa denda yang besar daripada nilai kerusakan lingkungan yang terjadi.
6. Memberikan insentif bagi perusahaan yang meminimalkan degradasi lingkungan, dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. insentif dan disinsentif ini dapat dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk perda.
7. Melakukan rehabilitasi hutan lindung berupa restorasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan hutan lindung, serta melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar dengan memanfaatkan hutan lindung.
9. Mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan;
10. Menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya.
11. Melakukan analisis ekonomi lingkungan untuk studi kelayakan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat
12. Pemindahan dengan penggantian oleh pemerintah secara bertahap, terhadap kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan taman nasional, namun mengganggu fungsi kawasan.
13. Kegiatan yang diperkenankan adalah perlindungan plasma nutfah, wisata dan pos pengawas, yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi, meliputi:

Melakukan kajian tentang perilaku hidup satwa liar, terutama bagi satwa liar yang dilindungi. hal ini berimplikasi pada kajian mendalam dan terperinci. Perlunya kajian dan perhitungan yang komprehensif dan cermat, terutama



kaitannya dengan biaya dan waktu, serta dampak terhadap ekosistem sekitarnya.

1. Perlu pengawasan dan penjagaan yang tinggi, terutama melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan illegal, khususnya illegal logging
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi kesejahteraan mereka, misalnya dalam pembuatan hutan desa yang dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk kepentingan lokal semata.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dengan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dengan mengadopsi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat setempat
4. Adanya perda yang memayungi hukum kelembagaan masyarakat tersebut sebagai suatu upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam mengaplikasikan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan
5. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif, hutan dan perkebunan dengan melakukan kajian penentuan outlet.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan, meliputi:

1. Pengetatan pemberian izin bagi permukiman terutama bagi permukiman yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman
2. Penetapan dan pengaturan zonasi bagi permukiman baru di kawasan agrominapolitan, yang tentunya berbeda dengan aturan zonasi di luar kawasan agrominapolitan, yang dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan perda sebagai payung hukum.
3. Upaya diversifikasi usaha agro dan mina untuk mengurangi resiko serangan wabah penyakit pada spesies agro-mina tertentu, yang berimplikasi pada kegagalan panen dan kerugian ekonomi
4. Dilarang melakukan kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan di sempadan sungai.



5. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan
6. Perlunya dibuat lembaga riset / penelitian untuk mengkaji kesesuaian jenis spesies ekonomi pada kawasan agro dan mina politan baik tanaman maupun perikanannya, serta kegiatan industri turunannya
7. Pemberian penyuluhan bagi petani dan nelayan sebagai transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi bagi perekonomian wilayah, dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan tersebut.
9. Menjaga hutan agar tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan produksi yang menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan di sekitarnya.
10. Mendorong kegiatan rehabilitasi dan reboisasi untuk menjaga kelangsungan fungsi hutan produksi dalam jangka panjang.
11. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan hutan produksi
12. Industri yang berada di dalam kawasan industri menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dan kawasan hutan untuk lokasi perwujudan kawasan peruntukan industri

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral, meliputi:

1. Membuat peraturan daerah sebagai payung hukum dengan berbagai macam aturan yang ketat tentang usaha pertambangan
2. Pengkajian secara rinci dan mendalam mengenai kajian lingkungan, teknis dan ekonomis bagi perusahaan pertambangan
3. Pencabutan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang melanggar aturan dan merusak lingkungan
4. Disintensif bagi perusahaan tambang yang merusak lingkungan atau yang tidak sesuai aturan

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, meliputi:

1. Setiap kebijakan atau program yang dibuat setiap instansi atau sektor harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.
2. Pengintegrasian kepentingan semua sektor, sehingga ada penghematan anggaran dan sumberdaya alam
3. Program – program kerja di instansi yang tidak sesuai dengan RTRW, RPJP, dan RPJM harus direvisi ulang

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman, meliputi:

1. Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci tentang pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan terutama kajian lingkungannya
2. Penetapan zona pengelolaan limbah domestik
3. Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
4. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif pembangunan TPA Sistem Sanitary Landfill.
5. Pembangunan lokasi TPA jauh dari pusat - pusat pemukiman.
6. Pnaatan penerapan Prosedur Standar Operasitpa Sistem Sanitary Landfill.
7. Disediakkannya sumur control disekitar kawasan tpa untuk mengetahui apakah air tanah disekiatar kawasan tidak atau telah tercemar.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut, meliputi:

1. Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci untuk relokasi permukiman terutama kajian lingkungan, teknis dan ekonominya
2. Penzonasian lahan gambut yang terperinci dan akurat di kapuas hulu akan meminimalisir kerusakan lahan gambut serta penentuan teknik pengelolaan yang lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Penzonasian lahan gambut akan melestarikan fungsi ekologi gambut: carbon sink, reservoir air, dan penyerap air
4. Lahan gambut yang lestari merupakan wadah (pool) bagi simpanan karbon (carbon sink). KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara intern dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. kajian yang telah dilakukan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011 - 2031 telah menghasilkan berbagai dampak positif dan negatif tersebut, yang kemudian dirumuskan langkah - langkah

Upaya pencegahan dan pengendalian dampak untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. rekomendasi untuk meminimalkan dampak serta memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam Dan Manusia tersebut adalah:

1. Harus segera membuat peraturan daerah, baik dari tingkat provinsi dan kabupaten sebagai payung hukum segala kebijakan, rencana dan/atau program yang akan dilaksanakan di setiap sektor. paradigma pembangunan yang berkelanjutan dengan mengaplikasikangreen economy (ekonomi hijau / berkelanjutan) sangat penting dilakukan sebagai acuan yang menjiwai penyusunan turunan kebijakan dan Program RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Memaksimalkan upaya – upaya mekanisme pasar jasa lingkungan, khususnya berkaitan dengan perdagangan karbon (carbon trade) dan kesediaan membayar imbal jasa hulu – hilir (willingness to pay) das kapuas. guna mempercepat usaha ini maka perlunya pembentukan tim ahli tersendiri yang menyiapkan mekanisme tersebut, dari rencana, mediasi/fasilitasi, hingga aksi. tim ini harus berasal dari berbagai elemen stake holder, lembaga swadaya masyarakat, peneliti, dan anggota masyarakat.
3. Penguatan upaya inovasi dan marketing ekowisata dari promosi hingga penarikan minat investor, sehingga dapat menarik wisatawan domestik dan manca negara.

4. Memasukkan muatan lokal pengenalan sumberdaya alam dan lingkungan kabupaten kapuas hulu dalam kurikulum sekolah. pendidikan lingkungan yang bermuatan lokal merupakan suatu upaya mentransfer ilmu pengetahuan bagi murid – murid sekolah yang merupakan generasi muda kapuas hulu untuk mencintai, memahami, dan manfaat fungsi dan peranan kekayaan alam kapuas hulu.
5. Pengintegrasian nilai – nilai kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat setempat dengan ilmu pengetahuan modern guna meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam mencegah, menghadapi, dan menanggulangi bencana.

Guna mencapai tujuan dan maksud tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Lembaga Pemerintah Daerah yang berperan membantu dalam menangani urusan bidang komunikasi dan Informatika, urusan bidang statistik mengacu pada Visi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yaitu ***“Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”***.

Makna yang terkandung dalam Visi diatas adalah sebagai berikut:

1. Harmonis: mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
2. Energik: mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
3. Berdaya saing: mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik,

didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;

4. Amanah: mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Terampil: mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi

Dalam mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Optimalnya predikat pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas hulu
2. Optimalnya kualitas Keterbukaan Informasi public

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Optimalnya predikat pelaksanaan SPBE kabupaten Kapuas hulu
3. Optimalnya kualitas keterbukaan informasi publik.

3.2.2. Sasaran

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2023 ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan SPBE kabupaten Kapuas hulu
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistic sectoral kabupaten Kapuas hulu
4. Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi public kabupaten Kapuas hulu.



Tabel. 3.1

Tujuan dan sasaran DKIS Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2021-2026)

No.	TUJIAN	SASARAN	INDIKATOR TUJIAN / SASARAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat sakip	BB
	Optimalnya predikat pelaksanaan SPBE kabupaten Kapuas hulu	Meningkatnya kualitas pelaksanaan SPBE kabupaten Kapuas hulu	Indeks pelaksanaan SPBE	2,8
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah dataset yang terintegrasi	330
			Indeks Pembangunan statistik	2,26
	Optimalnya kualitas keterbukaan informasi publik	Meningkatnya kualitas keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,3

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran.

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu:

3. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

3.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota



- 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 2) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 4) Pelayanan Informasi Publik
- 5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Sasaran 3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan SPBE kabupaten Kapuas hulu:

4. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

4.1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
- 2) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 3) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- 4) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 5) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

4.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota



- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 2) Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

5.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada dinas komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan program prioritas dalam renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing Program/ Kegiatan/ sub kegiatan sebagai berikut:



Tabel.4.1

REKAP USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN KAPUAS HULU

KODE OPD

OPD

kode						Urusan/Bidang Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja			RENCANA TAHUN 2024				Sumber Dana	Catatan Penting/ Analisis Kebutuhan	Perkiraan Maju Tahun 2025
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	TARGET CAPAIAN KINERJA					
												Program	Keluaran Sub Kegiatan (Berdasarkan Renstra)	Hasil Kegiatan		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								APBD		



						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							3.824.478.778,00	APBD		4.122.442.573,00
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							59.807.000,00	APBD	-	190.591.415,00
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Renstra Diskominfo 2021-2024 ; 2. IKU Diskominfo 2021-2024 ; 3. Renja Diskominfo 2022; 4. KAK Renja Diskominfo 2021; 5.Renja Perubahan Diskominfo 2021 .		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		147.129.605,00
2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah RKA Diskominfo202 2;		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen	6.465.000,00	APBD		7.302.199,00
2	16	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Perubahan RKA Diskominfo202 2;		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen	6.262.000,00	APBD		7.126.507,00



2	16	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah DPA Diskominfo 2021		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen		7.000.000,00	APBD		7.302.199,00
2	16	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA Diskominfo 2021		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen		7.000.000,00	APBD		7.126.507,00
2	16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		DISKOMINF OTIK		3 Laporan		7.000.000,00	APBD		7.302.199,00
2	16	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah Monev Kinerja Diskominfo Tahun 2021 per-triwulan; 2. Pengukuran Kinerja Diskominfo 2021 per-triwulan.		DISKOMINF OTIK		12 Laporan		16.080.000,00	APBD		7.302.199,00
2	16	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DISKOMINF OTIK				2.168.377.367,00	APBD		2.479.744.650,00



2	16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN Dinas Kominfo		DISKOMINF OTIK		20 Orang/bulan		1.930.925.992,00	APBD		2.351.530.977,00
2	16	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Pelaksanaan Verifikasi		DISKOMINF OTIK		4 Dokumen		187.016.500,00	APBD		50.383.488,00
2	16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024		DISKOMINF OTIK		1 Laporan		6.000.000,00	APBD		22.792.523,00
2	16	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaa		DISKOMINF OTIK		2 Dokumen		7.296.875,00	APBD		7.296.875,00
2	16	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan RFK - 0 (Jan-Des 2021) ; 2.Laporan Keuangan Semesteran (Jan s/d Juni 2021); 3. Laporan Fungsional Keuangan		DISKOMINF OTIK		16 Laporan		37.138.000,00	APBD		47.740.787,00



2	16	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		DISKOMINF OTIK				142.260.276,00	APBD	-	134.963.401,00
2	16	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik		Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen		1.245.420,00	APBD		7.296.875,00
2	16	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen		3.319.400,00	APBD		7.296.875,00
2	16	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		DISKOMINF OTIK		1 Laporan		1.962.000,00	APBD		7.296.875,00
2	16	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		DISKOMINF OTIK		1 Laporan		1.926.184,00	APBD		7.296.875,00



2	16	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		DISKOMINF OTIK		1 Laporan		2.716.000,00	APBD		7.296.875,00
2	16	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun 2021		DISKOMINF OTIK		1 Laporan		10.998.000,00	APBD		98.479.026,00
2	16	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		DISKOMINF OTIK				23.828.160,00	APBD	-	250.833.752,00
2	16	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Spanduk dan Banner pembinaan disiplin pegawai		DISKOMINF OTIK		52 Unit		8.000.000,00	APBD		10.951.468,00
2	16	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah DUK ;2. Kenaikan Pangkat 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Absen		DISKOMINF OTIK		4 Dokumen		5.945.160,00	APBD		56.184.984,00



2	16	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	DISKOMINF OTIK	1 Dokumen	-	APBD	7.296.875,00
2	16	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai 2. Penetapan Standar Teknik Kegiatan SKP 3.reformasi Birokrasi Dinas Kominfo	DISKOMINF OTIK	14 Dokumen	9.883.000,00	APBD	7.296.875,00
2	16	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sertifikat Diklat	DISKOMINF OTIK	11 Orang	-	APBD	169.103.550,00
2	16	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penyelengaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISKOMINF OTIK		552.045.975,00	APBD	- 645.966.245,00
2	16	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISKOMINF OTIK	1 Paket	-	APBD	26.620.000,00



2	16	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		DISKOMINF OTIK		10 Paket		115.000.000,00	APBD		88.294.015,00
2	16	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		DISKOMINF OTIK		3 Paket		10.000.000,00	APBD		31.394.696,00
2	16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		DISKOMINF OTIK		1 Paket		-	APBD		26.620.000,00
2	16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Presentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		DISKOMINF OTIK		1 Paket		45.000.000,00	APBD		86.403.862,00
2	16	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu		DISKOMINF OTIK		12 Laporan		20.000.000,00	APBD		44.450.076,00
2	16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		DISKOMINF OTIK		12 Laporan		350.000.000,00	APBD		307.396.580,00



2	16	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan Agenda Surat dan Masuk dan Keluar		DISKOMINF OTIK		4 Dokumen		12.045.975,00	APBD		34.787.016,00
2	16	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				DISKOMINF OTIK				653.160.000,00	APBD	-	210.171.555,00
2	16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening Telepon; 2.Rekening PDAM; 3.Rekening PLN; 4.Rekening Indihome; 5.Rekening TV Kabel; 6.Laporan Pengelolaan Website		DISKOMINF OTIK		12 Laporan		120.000.000,00	APBD		210.171.555,00
2	16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		DISKOMINF OTIK		12 Laporan		533.160.000,00	APBD		104.935.297,00



2	16	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		DISKOMINF OTIK				225.000.000,00	APBD		210.171.555,00
2	16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah STNK; 2.PKB; 3. Biaya perbaikan		DISKOMINF OTIK		2 Unit		100.000.000,00	APBD		134.252.114,00
2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		DISKOMINF OTIK		80 Unit		45.000.000,00	APBD		118.958.125,00
2	16	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		DISKOMINF OTIK		5 Unit		80.000.000,00	APBD		13.310.000,00



2	16	02	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Predikat Keterbukaan Informasi Publik		DISKOMINF OTIK		80 Unit		394.897.880,00	APBD		951.665.000 ,00
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota		DISKOMINF OTIK		5 Unit		394.897.880,00	APBD		951.665.000 ,00
2	16	02	2	01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Persentase disposisi laporan ke OPD		DISKOMINF OTIK		12 Dokumen		35.769.840,00	APBD		119.790.000 ,00
2	16	02	2	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah konten yang diproduksi		DISKOMINF OTIK		2000 Dokumen		104.324.670,00	APBD		346.060.000 ,00
2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah sebaran konten		DISKOMINF OTIK		7100 Dokumen		117.683.580,00	APBD		359.370.000 ,00



2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Informasi Publik yang terupload		DISKOMINF OTIK		230 Dokumen		137.119.790,00	APBD		126.445.000 ,00
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah kegiatan kemitraan		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen		-	APBD		199.650.000 ,00
2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Presentase Total bobot domain evaluasi SPBE		DISKOMINF OTIK				59.906.400,00	APBD		2.221.965.000,00
2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pengelolaan Nama domain yg telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain dilingkungan pemerintah kapuas hulu		DISKOMINF OTIK				28.716.100,00	APBD		255.000.000 ,00



2	16	03	2	01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Domain Website Desa	DISKOMINF OTIK		30 Domain	25.261.800,00	APBD		105.000.000 ,00
2	16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan serta Monitoring Domain dan Sub Domain Website di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	DISKOMINF OTIK		80 Dokumen	3.454.300,00	APBD		150.000.000 ,00
2	16	03	2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan SPBE di Lingkungan pemerintahan Kapuas Hulu	DISKOMINF OTIK			31.190.300,00	APBD		1.966.965.0 00,00
2	16	03	2	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Evaluasi Mandiri SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	DISKOMINF OTIK		10 Dokumen	31.190.300,00	APBD		219.615.000 ,00



2	16	03	2	02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Kebijakan Internal Layanan SPBE Kab. Kapuas Hulu		DISKOMINF OTIK		2 Dokumen		-	APBD		616.000.000 ,00
2	16	03	2	02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Kabupaten Kapuas Hulu		DISKOMINF OTIK		1 Unit		-	APBD		1.131.350.0 00,00
2	16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi Pendukung SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu		DISKOMINF OTIK		5 Unit		54.573.900,00	APBD		312.785.000 ,00
2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembang an dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		DISKOMINF OTIK		3 Dokumen		28.322.200,00	APBD		326.095.000 ,00



2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				DISKOMINF OTIK				1.036.200.000,00	APBD		1.036.200.000,00
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Presentase Kompilasi data statistik sektoral yang dilakukan		DISKOMINF OTIK				1.036.200.000,00	APBD		1.036.200.000,00
2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Presentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		DISKOMINF OTIK				20.830.300,00	APBD		492.470.000,00
2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen		38.985.000,00	APBD		332.750.000,00



2	20	02	2	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral		DISKOMINF OTIK		1 Dokumen		20.830.300,00	APBD		159.720.000,00
2	20	02	2	01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Forum Statistik Sektoral		DISKOMINF OTIK		50 Orang		-	APBD		133.100.000,00
2	21	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				DISKOMINF OTIK				2.550.075.000,00	APBD		2.550.075.000,00
2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Predikat KAMI Kabupaten Kapuas Hulu		DISKOMINF OTIK				34.795.300,00	APBD		-



2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau egovernemen		DISKOMINF OTIK				-	APBD		
2	21	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		DISKOMINF OTIK		1 Perangkat Daerah		-	APBD		-



2	21	02	2	02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Terlaksananya Kerjasama dengan BSSN dalam penertipatan tandatangan digital dan email sinapati di lingkungan pemerintah		DISKOMINF OTIK				34.795.300,00	APBD		
2	21	02	2	02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		DISKOMINF OTIK		1 Perangkat Daerah		34.795.300,00	APBD		399.300.000,00
TOTAL														5.350.278.358,00	-	-	8.332.272.573,00



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu didasarkan atas berbagai pertimbangan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika.

Semoga Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen rencana kerja.



**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB. KAPUAS HULU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK						4.434.516.498,00							12.160.115.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.412.349.494,00							12.160.115.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4.303.953.594,00							12.160.115.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.766.253.214,00						-	0,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	59.807.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6.465.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.262.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	16.080.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.166.381.279,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.930.925.992,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	187.016.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	5.300.787,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	37.138.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	70.328.960,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				52 Unit	8.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	46.500.800,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	5.945.160,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				14 Dokumen	9.883.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	552.045.975,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	115.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	10.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	12.045.975,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	39.530.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	39.530.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	653.160.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	533.160.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	225.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	100.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	45.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	80.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	394.897.880,00						-	1.150.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	394.897.880,00			-	-	-	-	1.150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Dokumen	35.769.840,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				2000 Dokumen	104.324.670,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				7100 Dokumen	117.683.580,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				230 Dokumen	137.119.790,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	142.802.500,00						-	11.010.115.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	28.716.100,00			-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi	-	-	2.595.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Domain	25.261.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi	-		495.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				80 Dokumen	3.454.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				11 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		1.950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	114.086.400,00			-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi	-	-	8.415.115.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	31.190.300,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi	-		219.615.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi	-		616.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		1.131.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				50 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		3.205.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		598.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				50 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		565.675.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				5 Unit	54.573.900,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		312.785.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah														
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Layanan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		192.995.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas														
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi	-		840.345.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	28.322.200,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mendorong Pembangu nan Jaringan Te lekomunika si Dan Listrik Dalam Upaya Pen gentasan Daerah Yang Belum Terlayani	-		326.095.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				2 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi	-		206.305.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				10 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelayanan Birokrasi yang Terintegrasi dan Sederhana dengan Basis Teknologi	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						59.815.300,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	59.815.300,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	59.815.300,00			-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Pembangunan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	38.985.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Pembangunan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				50 Orang	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Pembangunan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	20.830.300,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				50 Orang	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota	-	-	Memperkuat transformasi pelayanan publik Pembangunan Data Center, Sistem Elektronik Dan Digital, Jaringan Koneksi Intra Pemerintah	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur														
			Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						48.580.600,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	48.580.600,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	13.785.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	13.785.300,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	34.795.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				1 Perangkat Daerah	34.795.300,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X	NON URUSAN						22.167.004,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						22.167.004,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	22.167.004,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	22.167.004,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	1.245.420,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	3.319.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Laporan	1.962.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1.926.184,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	2.716.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	10.998.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				11 Orang	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material															
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	J U M L A H							4.434.516.498,00							12.160.115.000,00		